DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Beatson, J., Andrew S. Burrows, and John Cartwright. *Anson's Law of Contract*. 31st ed. London: Oxford University Press. 2020.

Subekti, S. H., Lestari, V. N. S., & SE, M. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jakad Media Publishing.* 2020.

Imelda, C., Ma'arij, A., Mangar, I.,Hazmi, R. M., Sukmareni,S.,Abidin, M. A.,& Hidayah, A. *Logika dan Argumen dalam Penalaran Hukum.* CV. Gita Lentera. 2024

Roman, V. E. *Peran Polisi Militer sebagai Penyidik.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016

Teguh Prasetyo, S. H. *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Nusamedia.* 2019.

Hasim Purba, S. H. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*.2023.

Sinar Grafika.Stahl, F. J. *Die Philosophie des Rechts (Teori Negara Hukum).* Heidelberg: J.C.B. Mohr. 2018.

Hernoko, A. Y., & Sh, M. H. *Hukum Perjanjian. Prenada Media.* 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.

JURNAL & HASIL PENELITIAN

Aman, A., & Saputra, R. (2023). *Implikasi Yuridis Wanprestasi Anggota TNI dalam Perjanjian Kredit Bank.* Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(2), 215-230.

Arisandy, D. (2022). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan oleh Anggota TNI.* Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(5), 342-358.

Damayanti, R. (2022). *Tanggung Jawab Persero Aktif/Pasif CV atas Wanprestasi Perjanjian terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan PN Pekanbaru No. 09Pdt.G/2022/PN Pbr).* Jurnal Hukum Respublica, 21(2), 145-160.

Hidayat, S., & Kurniawan, A. (2021). *Implementasi Sanksi Disiplin terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Pelanggaran Perdata.* Jurnal Ilmu Militer dan Strategi, 7(2), 110-125.

Baskoro, B. D. (2018). *Problematika Eksekusi Putusan Perdata terhadap Aset Militer dan Anggota TNI.* Jurnal Yudisial, 11(3), 301-318.

Fahri, M., & Santoso, B. (2021). *Perlindungan Hukum Kreditur atas Wanprestasi yang Dilakukan Oknum Prajurit TNI*. Notarius, 14(1), 45-58.

Gunawan, Y. (2022). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Prajurit TNI sebagai Subjek Hukum dalam Ranah Hukum Privat.* Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 8(2), 188-205.

Johnson, M. (2021). Military Discipline and Civil Liability: A Comparative Study. *International Journal of Military Law and State of War, 59(1), 45-62. Putra, R. A. (2019).* Kedudukan Hukum Anggota TNI dalam Perkara Perdata di Peradilan Umum. *Jurnal Hukum Replik, 7(1), 12-25. Sari, I. (2020).* Wanprestasi dalam Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, *10(2),41-55.*

Sirait, N. V. S. (2018). *Definisi dan status anggota TNI sebagai bela negara dalam sistem pertahanan.* Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 8(3), 19-34.

Smith, L., & Doe, J. (2019). *Contractual Breach and Professional Ethics in Military Personnel.* Journal of Military Ethics, 18(3), 210-228.

Swandana, A. (2023). *Yurisdiksi Peradilan Militer terhadap Tindak Pidana Koneksitas TNI-Sipil.* Jurnal Hukum Militer, 9(1), 77-92.

Wibowo, T. (2018). *Peran Polisi Militer dalam Penegakan Hukum terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Pelanggaran Hukum*. Jurnal Hukum Militer, 4(2), 88-102.

Kurniadi, W. (2025). Legal Responsibility in Breach of Contract in Sale and Purchase Agreement. *LSHP RESEARCH: Law Sciences, Humanities and Politics Journal*, *1*(1), 1-6.

Lubis, M. R. (2020). *Sinkronisasi Sanksi Administrasi dan Sanksi Disiplin bagi Prajurit TNI yang Melanggar Hukum Perdata.* Jurnal Militer & Hukum, 12(1), 55-72.

Nasution, A. H. (2024). *Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia.* Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa, 3(1), 12-29.

Noer, Z. (2024). A Contract Reviewed from the Perspective of Civil Law in Indonesia may be Delayed due to Force Majeure. *IBLAM Law Review*, *4*(1), 135-148.

Pratama, D. A., & Handayani, I. G. A. K. R. (2019). *Pertanggungjawaban Perdata Prajurit TNI dalam Pelaksanaan Tugas Operasi.* Jurnal Kertha Patrika, 41(2), 110-125.

Rhogust, M. (2025). Tanggung Jawab Hukum Perdata untuk Pelanggaran Kontrak di Indonesia: Analisis dan Praktik Kasus. *Jurnal Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora*, *2*(2), 429-439.

Rini, I. (2023). Due to legal cancellation of land purchase deed. *International Journal of Social Science*, 2197.

Setiawan, B. (2025). *Analisis Yuridis Implementasi Doktrin Sapta Marga dalam Ketaatan Hukum Perdata bagi Prajurit TNI.* Jurnal Pertahanan Nasional, 10(3), 301-315.

Wicaksono, A. (2017). *Kompetensi Peradilan Umum dalam Mengadili Perkara Perdata yang Melibatkan Anggota TNI sebagai Tergugat.* Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(2), 245-266.

Zulfa, E. A. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perjanjian Fidusia oleh Anggota Militer.* Jurnal Hukum Pembangunan, 53(1), 88-104.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. RepublikIndonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek).*

SUMBER LAIN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Juhaeni. (2026). Wawancara pribadi dengan Pasi Juhaeni di Detasemen Polisi Militer (Denpom) III/3 Cirebon.

Mabes TNI. (2024). Doktrin Militer: Sapta Marga dan 8 Wajib TNI. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.